
Pengaruh Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Manajemen Fraksi Partai di DPRD Kabupaten Kuningan

Agil Suyana^{1*}, Usran Masahere²

Universitas Bina Sarana Informatika^{1,2}

Jl. Kramat Raya No.98, Jakarta

Email Korespondensi: agilsuyana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi anggaran secara parsial maupun simultan terhadap efektivitas manajemen Fraksi Partai di DPRD Kabupaten Kuningan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder berupa laporan realisasi anggaran tahun 2024 yang diproses pada tahun 2025, serta data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 50 responden yang merupakan staf fraksi di DPRD Kabupaten Kuningan. Berdasarkan hasil pra-survei, indikator rincian alokasi biaya operasional dan bukti laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang sah menjadi faktor paling menonjol yang dinilai berpengaruh tinggi dalam meningkatkan efektivitas manajemen biaya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statistik kuantitatif untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian diharapkan dapat mendeskripsikan kondisi nyata penerapan transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta membuktikan secara empiris kontribusinya terhadap pencapaian efektivitas manajemen biaya operasional guna mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) fraksi.

Kata Kunci: **Transparansi Anggaran; Akuntabilitas; Efektivitas Manajemen**

ABSTRACT

This study aims to analyze the partial and simultaneous effects of budget accountability and transparency on the effectiveness of operational cost management for party factions in the Regional House of Representatives (DPRD) of Kuningan Regency. This research employs a quantitative method. The data used consist of secondary data from the 2024 budget realization report processed in 2025, and primary data obtained by distributing questionnaires to 50 respondents, who are faction staff at the DPRD of Kuningan Regency. Based on the pre-survey results, the details of operational cost allocation and valid accountability reports (LPJ) are the most prominent factors perceived to have a high impact on improving cost management effectiveness. Data analysis in this study uses a quantitative statistical approach to test the relationships between variables. The results are expected to describe the actual conditions of budget transparency and accountability implementation, as well as empirically prove their contribution to achieving operational cost management effectiveness to support the core duties and functions (Tupoksi) of the factions.

Keywords: **Budget Transparency; Accountability; Cost Management Effectiveness**

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu keharusan dalam pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat reformasi keuangan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Prinsip utama yang ditekankan adalah pengelolaan keuangan negara/daerah yang dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Widjaja & Sijabat, 2025; Putro, 2024). Dua pilar fundamental dalam mewujudkan amanat tersebut adalah akuntabilitas dan transparansi anggaran.

wajiban manajer publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya. Sementara itu, transparansi diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan kebijakan dan mengelola sumber daya publik, yang memungkinkan masyarakat dan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu (Amalia, 2023; Aliyyah & Kusumawati, 2024). Penerapan kedua prinsip ini diharapkan dapat mendorong terciptanya efektivitas manajemen biaya operasional di sektor publik.

Penyelenggaraan tata kelola yang baik menuntut pengelolaan anggaran daerah yang akuntabel dan transparan. Namun, fenomena empiris yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan biaya operasional Fraksi Partai di DPRD Kabupaten Kuningan masih menghadapi tantangan berat. Berdasarkan hasil pra-survei awal terhadap 50 responden

staf fraksi, ditemukan indikasi kuat belum efektifnya manajemen biaya. Hal ini tercermin dari rendahnya kemampuan fraksi dalam menekan pengeluaran yang bersifat seremonial serta seringnya alokasi biaya operasional yang keluar secara mendadak dan tidak terjadwal. Gejala pemborosan pos belanja operasi ini bahkan sempat memicu kritik tajam dari internal legislatif itu sendiri.

Di sisi lain, celah penelitian (*research gap*) dalam topik ini ditunjukkan oleh adanya ketidakselarasan hasil dari studi terdahulu. Penelitian oleh Munandar & Munir (2026) dan Dusengimana et al. (2026) menyatakan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas keuangan. Sebaliknya, Ramechi et al (2026) dan Iskandar et al (2025) justru menemukan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang lemah terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Selain adanya inkonsistensi hasil tersebut, literatur akuntansi sektor publik sejauh ini masih didominasi oleh objek penelitian pada instansi eksekutif, dan masih sangat terbatas yang meneliti secara mendalam pada ruang lingkup internal fraksi partai politik di lembaga legislatif daerah. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menguji secara empiris

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah memegang peran sentral dalam siklus pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggota DPRD, yang terhimpun dalam fraksi-fraksi partai, mengelola dana operasional yang signifikan, yang bersumber dari APBD. Efektivitas manajemen biaya operasional fraksi menjadi indikator penting dalam menilai kinerja dan pemanfaatan dana publik. Manajemen biaya yang efektif berarti penggunaan anggaran yang efisien, ekonomis, dan tepat sasaran untuk mendukung tugas dan fungsi kedewanan. Berikut ini Hasil Pra Survey dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pra Survey dari Efektivitas yang mengacu pada tujuan penggunaan biaya operasional tercapai dengan hasil maksimal

No	Variabel	Total	Peringkat
1	Bukti yang sah laporan pertanggung jawaban(LPJ)	9	2
2	Prosedur sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	0	
3	Pengeluaran biaya operasional fraksi dapat dipertanggungjawabkan	8	
4	Penggunaan dana operasional dilakukan secara tepat waktu	2	
5	Fraksi memiliki akses untuk mengetahui jumlah sisa plafon anggaran		
6	Rincian alokasi biaya operasional	11	1
7	Tidak ada biaya operasional yang dialokasikan secara mendadak	0	
8	Sekretariat DPRD atau staf fraksi memberikan informasi yang jujur mengenai ketersediaan anggaran	5	
9	Penggunaan biaya operasional sudah sangat mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) fraksi di DPRD	4	
10	biaya yang diberikan mampu mencukupi kebutuhan kegiatan fraksi	5	
11	Manajemen biaya operasional berhasil menekan pengeluaran yang bersifat seremonial/tidak penting	0	
12	Dukungan dana operasional berdampak langsung pada peningkatan produktivitas fraksi	6	

Sumber: (Hasil Kuisisioner Pada 50 responden Staff Fraksi DPRD Kabupaten Kuningan, 2026)

Hasil dari pra survei telah dilakukan menunjukkan data terkait Efektivitas yang mengacu pada tujuan penggunaan biaya operasional di Fraksi Partai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, Dari total 50 Orang yang mengisi kuesioner, terlihat bahwa Adanya rincian biaya yang jelas (seperti biaya rapat, perjalanan dinas, atau sekretariat) tanpa ada yang disembunyikan, namun dari hasil keseluruhan yang menonjol hanya ada 2 yaitu Rincian alokasi biaya operasional dan Bukti yang sah laporan pertanggung jawaban(LPJ). Dari Tabel I.1, terlihat bahwa kedua faktor ini di nilai memiliki pengaruh tinggi dalam meningkatkan efektivitas manajemen Biaya operasional fraksi partai di dprd Kabupaten kuningan.

Dalam konteks DPRD Kabupaten Kuningan, pengelolaan anggaran, termasuk dana operasional fraksi, seringkali menjadi subjek pengawasan dan sorotan publik. Keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana ini sangat vital untuk membangun kepercayaan publik. Fraksi Partai di DPRD Kabupaten Kuningan, juga mengelola alokasi anggaran yang harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku. Data dan laporan realisasi anggaran tahun 2024 yang akan diolah pada tahun 2025 menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Data awal dan isu yang berkembang menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di beberapa lembaga legislatif daerah masih menghadapi tantangan. Sebagai contoh, Fraksi Gerindra sendiri pernah melontarkan kritik tajam terhadap postur RAPBD 2026 yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi

anggaran, menyoroti lonjakan belanja operasi. Kritik ini mengindikasikan adanya perhatian internal terhadap efisiensi, namun di sisi lain, praktik internal pengelolaan biaya operasional fraksi sendiri perlu diteliti lebih lanjut.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Studi oleh Munandar & Munir (2026) menemukan pengaruh positif signifikan akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan daerah. Namun, penelitian lain oleh Ramechi et al (2026) menemukan pengaruh transparansi yang lemah terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) dan perlunya penelitian ulang dengan fokus objek yang spesifik, yaitu Fraksi Partai di DPRD Kabupaten Kuningan, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh bukti empiris yang terukur. Data yang akan diolah adalah data primer dari kuesioner dan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran tahun 2024 yang diproses pada tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas, muncul dugaan bahwa tinggi rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran operasional fraksi akan mempengaruhi efektivitas manajemen biaya yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan kuantitatif Transparansi Anggaran (sebagai variabel X1) dan Akuntabilitas (sebagai variabel X2) terhadap efektivitas manajemen biaya operasional (sebagai variabel Y) di Fraksi Partai DPRD Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Manajemen Biaya Operasional Fraksi Partai secara parsial dan simultan di DPRD Kabupaten Kuningan

2. TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran negara untuk bantuan keuangan partai politik dengan fokus pada perbandingan sistem presidensial dan parlementer di negara-negara Asia Tenggara. Latar belakang penelitian mengidentifikasi permasalahan rendahnya transparansi dan akuntabilitas partai politik di Indonesia dalam pengelolaan keuangan, serta kekaburan norma dalam regulasi yang menyebabkan celah praktik koruptif. Tujuan penelitian adalah mengkaji pengaturan bantuan keuangan yang ideal, mekanisme pengawasan yang efektif, dan reformasi regulasi yang diperlukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Pembahasan penelitian menguraikan perbandingan pengaturan bantuan keuangan partai politik di negara-negara Asia Tenggara dengan sistem presidensial (Filipina, Timor Leste) yang cenderung terpusat dengan dominasi eksekutif dan sistem parlementer (Malaysia, Thailand, Singapura) yang lebih terdesentralisasi dengan peran kunci parlemen. Penelitian juga membahas potensi penggunaan APBN sebagai sumber tunggal keuangan partai politik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa (Kristiani, 2024).

Transparansi adalah pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah (Bakhtiar, 2021)

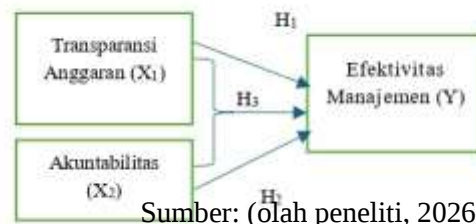
Fokus yang menjadi pokok pemikiran dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan, hambatan, dan upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Kuningan Jawa Barat. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: Kebijakan bantuan keuangan bagi partai politik merupakan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan kemandirian kepada partai politik dalam mengelola anggaran bantuan politik, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun selama ini implementasinya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, yang mana dijelaskan bahwa besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPRD sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah. Hambatan dalam implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), antara lain dari aspek administrasi keuangan masih banyak berkas pertanggungjawaban yang belum dapat diselesaikan oleh partai. Selanjutnya dari aspek sumber daya manusia, masih ada pengelola keuangan di partai politik yang belum terbiasa mengadministrasikan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015. Lebih lanjut dari aspek regulasi, peraturan perundang-undangan tentang bantuan keuangan bagi partai politik saat ini masih perlu direvisi karena kurang mengakomodasi kepentingan partai politik. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Partai, dapat dilakukan melalui penambahan anggaran untuk kegiatan pendidikan politik agar semakin banyak kader dan anggota partai yang memiliki moral dan pemahaman baik terhadap dunia perpolitikan di Indonesia. Selanjutnya mengupayakan penggunaan anggaran yang bersumber dari iuran dari kader partai dan sumbangan lain yang sah menurut undang-undang, sebelum dana bantuan dari pemerintah diterima.

Transparansi keuangan adalah penyusunan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor public (Pratiwi et. Al., 2024)

Berdasarkan pemikiran para ahli di atas, dapat disintesis Transparansi Anggaran kan informasi keuangan yang jujur, relevan, dan terstruktur mengenai pengelolaan dana operasional, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh seluruh pihak yang berkepentingan secara jelas.

Menurut Safitri (2025) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (principal).

management effectiveness is used as a performance measure as well as a predictive measure of performance, especially the effectiveness of performance improvement. The role of managers therefore becomes essential in achieving important milestones in the development of the business. Timely and effective decision making is important in allocating resources and optimizing business opportunities Thi & Linh, 2025)



Sumber: (olah peneliti, 2026)

Gambar 1 Kerangka Berpikir

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₀₁: Tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara Transparansi Anggaran terhadap efektivitas manajemen Fraksi Partai di DPRD Kabupaten Kuningan.

H_{a1}: Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara Transparansi anggaran terhadap efektivitas manajemen Fraksi Partai di DPRD Kabupaten Kuningan.

H₀₂: Tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara Akuntabilitas terhadap efektivitas manajemen Fraksi Partai di DPRD Kabupaten Kuningan.

H_{a2}: Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara Akuntabilitas terhadap efektivitas manajemen Fraksi Partai di DPRD Kabupaten Kuningan.

H₀₃: Tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) antara Transparan Anggaran dan Akuntabilitas terhadap efektivitas manajemen Fraksi Partai di DPRD Kabupaten Kuningan.

H_{a3}: Terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) antara Transparan Anggaran dan Akuntabilitas terhadap efektivitas manajemen Fraksi Partai di DPRD Kabupaten Kuningan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif yang menyajikan data berupa angka-angka sebagai hasil penelitiannya. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, atau peristiwa saat ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui kuesioner, observasi dan wawancara. Jenis pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling acak (simple random sampling) dipemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan. Sampel yang digunakan berjumlah 50 responden. Skala pengukuran menggunakan scale likert dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data deskriptif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf administrasi dan pengelola keuangan internal fraksi-fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan. Berdasarkan data pra-survei, total populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 orang.

Agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan, maka sampel yang diambil harus mewakili karakteristik populasi secara proporsional. Oleh karena itu, pemilihan teknik sampling yang tepat sangat penting untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian (Shalsabila & Kamilah, 2022). Sampel di ambil sebanyak 50 orang dan Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh, yang merupakan teknik di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Mengingat ukuran populasi yang relatif kecil dan terbatas, maka metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Sampling Jenuh (Sampel Jenuh). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama dengan jumlah populasinya, yaitu sebanyak 50 responden.

Teknik Analisis Data

Peneliti ini mengambil metode Kuantitatif untuk memudahkan analisis data, dan peneliti akan menggunakan pengolah data SPSS (Statistical Package For The Social Sciences). Analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa teknik analisis, berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji regresi linier berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

1. Uji Validitas

Tabel 2. Uji Validitas

Kode item	Nilai r hitung X ₁	Nilai r hitung X ₂	Nilai r hitung Y	Nilai r tabel	Keterangan
1	0,705	0,678	0,599	0,279	Valid
2	0,744	0,725	0,667		
3	0,698	0,729	0,776		
4	0,774	0,844	0,743		
5	0,776	0,819	0,734		
6	0,810	0,719	0,791		
7	0,759	0,836	0,803		
8	0,710	0,789	0,710		
9	0,721	0,796	0,693		
10	0,706	0,687	0,765		

Sumber: (Hasil Olah Data SPSS 22, 2026)

Berdasarkan Tabel 2, dilakukan pengujian validitas untuk ketiga variabel dengan membandingkan nilai r_{hitung} dan nilai r_{tabel} . Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dan jumlah responden sebanyak $N = 50$, sehingga diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,279 ($df = 48$). Dari hasil analisis, diketahui bahwa seluruh item pernyataan 1 sampai 10, memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, yaitu nilai antara 0,667 – 0,844 $>$ 0,279. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan untuk ketiga variabel dinyatakan valid

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi respon yang diperoleh dari kuesioner, dengan tujuan untuk menilai tingkat konsistensi instrumen tersebut. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilaksanakan dengan menggunakan analisis *Cronbach's Alpha*. Apabila sebuah variabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* melebihi 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut dianggap andal atau konsisten dalam melakukan pengukuran. Berikut ini adalah hasil pengujian reliabilitas keseluruhan variabel yang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	N (Responden)	Jumlah Pernyataan	Keterangan
Transparansi Anggaran (X1)	0,908	50	10	Realabel
Akuntabilitas (X2)	0,919	50	10	Realabel
Efektivitas Manajemen (Y)	0,901	50	10	Realabel

Sumber: (Hasil Olah Data SPSS 22, 2026)

Berdasarkan tabel 3, hasil pengujian keandalan variabel Transparansi Anggaran (X1), Akuntabilitas (X2), dan Efektivitas Manajemen (Y) menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60 dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Pertama, variabel Transparansi anggaran memiliki nilai

Cronbach's Alpha sebesar 0,908. Kedua, variabel Akuntabilitas memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,919. Dan ketiga, variabel Efektivitas Manajemen memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,901. Dengan demikian, hasil pengujian keandalan terhadap keseluruhan variabel dalam penelitian ini dinyatakan andal jika respon responden terhadap pernyataan konsisten atau stabil. Oleh karena itu, butir pernyataan dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

3. Uji Normalitas

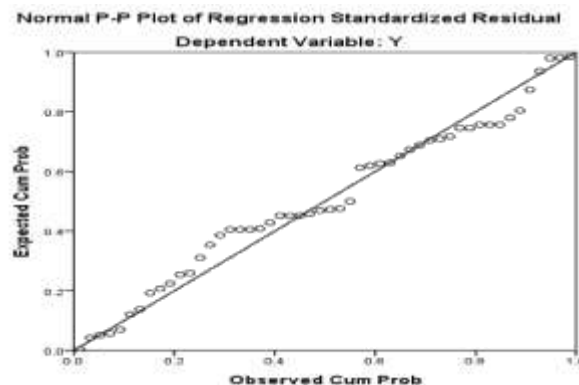
Pengujian kenormalan dilakukan dengan memeriksa sampel Kolmogorov-Smirnov yang telah diuji melalui aplikasi SPSS 22. Pengujian kenormalan bertujuan untuk mengevaluasi apakah distribusi data variabel yang akan digunakan dalam penelitian bersifat normal atau tidak. Pengujian kenormalan dilaksanakan dengan membandingkan normal, dan sebaliknya, jika nilai signifikan $< 0,05$, maka data tidak memiliki distribusi normal. Berikut merupakan hasil pengujian kenormalan yang dapat dilihat pada tabel di bawah. nilai signifikansi dari variabel. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data memiliki distribusi.

Tabel 4. Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	50
Asymp Sig. (2-tailed)	.200

Sumber: (Hasil Olah Data SPSS 22, 2026)

Berdasarkan tabel 4 hasil pengujian kenormalan yang ditampilkan, dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar $0,200 > 0,05$. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa data yang diperoleh dari populasi terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Berikut merupakan pemeriksaan kenormalan dengan menggunakan grafik normal P-plot:



Sumber: (Hasil Olah Data SPSS 22, 2026)

Gambar 2. Grafik Uji Normalitas P-Plot

Berdasarkan Gambar 2 grafik normal P-Plot kenormalan yang ditampilkan, terlihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, tidak menyimpang atau tersebar jauh dari garis tersebut. Dengan demikian sesuai dengan pernyataan, grafik normal P-Plot di atas mendekati garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang diperoleh distribusi secara normal.

4. Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual (Abs_RES), diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

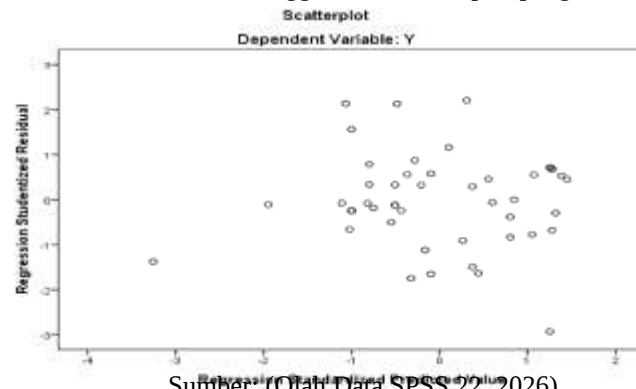
No	Variabel Independen	Nilai Signifikansi (Sig.)	Batas Minimum	Keterangan
1	Transparansi Anggaran (X_1)	0,314	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
2	Akuntabilitas (X_2)	0,625	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: (Data Primer Diolah, 2026)

Berdasarkan output Tabel 5, dapat dijabarkan interpretasi data sebagai berikut:

1. Variabel Transparansi Anggaran (X_1) menghasilkan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,314. Nilai ini lebih besar dari 0,05 ($0,314 > 0,05$), yang membuktikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada variabel X_1 .
2. Variabel Akuntabilitas (X_2) menghasilkan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,625. Nilai ini lebih besar dari 0,05 ($0,625 > 0,05$), yang membuktikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada variabel X_2 . Oleh karena seluruh variabel independen dalam model regresi ini memiliki nilai signifikansi yang berada di atas ambang batas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi klasik heteroskedastisitas telah terpenuhi dan model regresi linear berganda layak digunakan

Tujuan dilakukannya pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa model regresi yang terbentuk tidak mengalami ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya, sehingga model regresi dapat dinyatakan baik karena tidak terjadi heteroskedastisitas. Penilaian apakah suatu model regresi mengalami heteroskedastisitas atau tidak dapat dilakukan dengan melihat pola pada hasil pengamatan scatter plot. Berikut merupakan hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan scatter plot pengamatan di bawah ini.



Sumber: (Olah Data SPSS 22, 2026)
Gambar 3. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar 3 scatter plot uji heteroskedastisitas yang ditampilkan, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa pada data penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, baik uji normalitas, multikolinieritas, maupun heteroskedastisitas pada data hasil penelitian ini memenuhi asumsi yang diperlukan, sehingga pengujian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

5. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas dapat diperiksa dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Pengujian ini digunakan karena terdapat asumsi dalam analisis regresi yang mengharuskan variabel-variabel independen terbebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Transparansi Anggaran (X_1)	.321	3.115
Akuntabilitas (X_2)	.321	3.115

Sumber: (Hasil Olah Data SPSS 22, 2026)

Berdasarkan tabel 6 hasil pengujian multikolinearitas yang ditampilkan, menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk variabel Transparansi Anggaran (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) adalah $0,321 > 0,10$. Sementara itu, nilai VIF (Variance Inflation Factor) untuk variabel Transparansi Anggaran (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) adalah $3,115 < 10$. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi ini.

6. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah variabel-variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda dilakukan karena terdapat dua variabel independen, yaitu Transparansi Anggaran (X_1) dan Akuntabilitas (X_2). Pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen tersebut terhadap

Efektivitas Manajemen (Y) Biaya Operasional Fraksi Partai di DPRD Kabupaten Kuningan dengan menggunakan aplikasi SPSS 22. Berikut merupakan hasil dari perhitungan regresi linier berganda yang diperoleh:

Tabel 7. Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien (β)	t-Statistic	Sig.
Konstanta	9.002	3.534	.014
Transparansi Anggaran (X_1)	-.077	.136	.575
Akuntabilitas (X_2)	.865	.131	.000

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 22 (2026)

Berdasarkan hasil dari tabel 7 hasil uji regresi linier berganda diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta dan koefisiensi regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda dengan menggunakan model perumusan yaitu:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + e$$

$$Y = 9,002 + -0.077X_1 + 0.865X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Efektivitas Manajemen

A = Konstanta

B1-B2 = Koefisiensi Regresi

X1= Transparansi Anggaran

X2= Akuntabilitas

E= Standar Error

Berdasarkan Persamaan Tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai Konstanta (a) sebesar 9,002 yang bernilai positif. Ini berarti bahwa jika tidak ada variabel Transparansi Anggaran (X_1) dan Akuntabilitas (X_2), maka Efektivitas Manajemen (Y) akan tetap ada sebesar 9,002satuan.
- Koefisien Variabel Transparansi Anggaran (X_1) Sebesar -0,007 yang bernilai positif, Artinya pengaruh Transparansi Anggaran (X_1) terhadap Efektivitas Manajemen (Y) adalah positif dan kuat, Hal ini menunjukkan bahwa jika Efektivitas Manajemen juga akan meningkat.
- Koefisien Variabel Akuntabilitas (X_2) Sebesar 0,865 yang bernilai positif, Artinya pengaruh Akuntabilitas (X_2) terhadap Efektivitas Manajemen (Y) adalah positif dan kuat, Hal ini menandakan bahwa jika Akuntabilitas meningkat, maka Efektivitas Manajemen juga akan meningkat.

7. Uji t

Uji T digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen, yaitu Transparansi Anggaran (X_1) dan Akuntabilitas (X_2), mempengaruhi Efektivitas Manajemen (Y) secara parsial atau individual. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hasilnya dianggap tidak signifikan, yang berarti tidak terdapat pengaruh, Berikut adalah hasil uji t dalam penelitian ini.

Tabel 8. Uji t

Model	t	Sig
(Constant)	2.547	.014
Transparansi Anggaran (X_1)	-.565	.575
Akuntabilitas (X_2)	6.586	.000

Sumber: (Hasil Olah data SPSS 22, 2026)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 8 hasil uji parsial (uji t) diatas menunjukkan bahwa dalam memperoleh nilai ttabel dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ttabel = (a/2) : n - k - 1)$$

$$ttabel = (0,05/2 : 50 - 2 - 1)$$

$$ttabel = (0,025 : 50)$$

$$ttabel = \text{angka } 0,025 : 50 \text{ dalam distribusi nilai ttabel sebesar } 2,018.$$

- Transparansi Anggaran (X_1) dapat diketahui bahwa thitung > ttabel (-0,565 < 2,018) dan nilai signifikansi pada uji t sebesar 0,575> 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Transparansi Anggaran (X_1) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Efektivitas Manajemen (Y) Biaya Operasional Fraksi Partai Di DPRD Kabupaten Kuningan sehingga H1 ditolak.
- Akuntabilitas (X_2) dapat diketahui bahwa thitung > ttabel (6,586 > 2,018) dan nilai signifikansi pada uji t sebesar 0,040 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas (X_2) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Efektivitas Manajemen (Y) Biaya Operasional Fraksi Partai Di DPRD Kabupaten Kuningan sehingga H2 diterima.

8. Uji F

Uji F digunakan untuk menentukan apakah variabel independen secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka terdapat pengaruh simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji simultan (uji F) yang dilakukan menggunakan SPSS 22.

Tabel 9. Uji F

Model	F	Sig
Regression	58.507	.000
Residual		
Total		

Sumber: (Hasil Olah Data SPSS 22, 2026)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel IV.16 hasil uji simultan (uji f) diatas menunjukkan bahwa dalam memperoleh nilai f_{tabel} probabilitas 0,5 pada tingkat signifikansi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$df_1 = k - 1$ $df_2 = n - k$ Keterangan:

df = derajat kebebasan $k = 3$ (jumlah variabel)

$n = 50$ (Jumlah sampel) $df_1 = 3 - 1 = 2$

$df_2 = 50 - 3$ Jadi, diperoleh nilai f_{tabel} 58,5.

Hasil uji simultan (uji f) diatas menunjukkan bahwa nilai f_{hitung} (102,491) $> f_{tabel}$ (58,5) dan nilai signifikansi f_{tabel} $0,050 < 0,05$ yang artinya H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi Anggaran (X1) dan Akuntabilitas (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Manajemen (Y) Biaya Operasional Fraksi Partai di DPRD Kabupaten Kuningan.

9. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi simultan membantu dalam memahami seberapa baik model regresi yang dibuat dapat menjelaskan variabilitas dari variabel dependen ketika mempertimbangkan semua variabel independen secara bersamaan.

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi Simultan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.845	.713	.701	2.26297

Sumber: (Hasil Olah Data SPSS 22, 2026)

Berdasarkan hasil data tabel model summary di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square variabel Transparansi Anggaran (X1) dan Akuntabilitas (X2) adalah sebesar 0,701. Hal ini berarti bahwa, setelah disesuaikan dengan jumlah prediktor dalam model, 9,2% dari variasi dalam Efektivitas Manajemen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas secara simultan. Sisanya 90,8% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

1. Pengaruh Transparansi Anggaran Terhadap Efektivitas Manajemen

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 50 responden dapat dilihat bahwa hasil pengujiannya yang diperoleh nilai uji t untuk variabel Transparansi Anggaran $> t_{tabel}$ (0,565 $< 2,018$) dan nilai signifikansi pada uji t sebesar 0,575 $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa Transparansi Anggaran (X1) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Efektivitas Manajemen (Y) Operasional Fraksi Partai di DPRD Kabupaten Kuningan sehingga H_1 ditolak. Hal ini artinya bahwa Peningkatan atau penurunan Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas tidak memiliki dampak yang konsisten atau jelas terhadap Efektivitas Manajemen. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Tanjung, 2026) yang mendapatkan hasil penelitian pengaruh signifikan.

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Manajemen

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 50 responden dapat dilihat bahwa hasil pengujiannya yang diperoleh nilai uji t untuk variabel disiplin Kerja $t_{hitung} > t_{tabel}$ (6,586 $> 2,018$) dan nilai signifikansi pada uji t sebesar 0,040 $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas (X2) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Transparansi Anggaran (Y) Operasioanal Fraksi Partai di DPRD Kabupaten kuningan sehingga H_2 diterima. Hal ini artinya Ketika Akuntabilitas meningkat, Transparansi Anggaran juga meningkat. Akuntabilitas yang baik

mungkin mencakup kepatuhan terhadap Transparansi Anggaran, aturan perusahaan, dan prosedur operasional standar. Hasil penelitian ini sejalan dan didukung dengan penelitian (Thanaraj, 2025) yang hasilnya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Akuntabilitas terhadap Transparansi Anggaran. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas terhadap Transparansi Anggaran di Fraksi Partai DPRD Kabupaten Kuningan.

3. Pengaruh Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Manajemen

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 50 responden dapat dilihat bahwa hasil pengujiannya yang diperoleh nilai uji f_{hitung} (102,491) > f_{tabel} (3,22) dan nilai signifikansi f_{tabel} 0,050 < 0,05 yang artinya H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Manajemen Operasional fraksi Partai di DPRD Kabupaten Kuningan. Artinya, baik Transparansi Anggaran maupun Akuntabilitas tidak hanya memiliki pengaruh secara individual, tetapi juga secara bersama-sama mempengaruhi Efektivitas Manajemen. Dalam konteks ini, peningkatan baik dalam Transparansi Anggaran maupun Akuntabilitas dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Efektivitas Manajemen di DPRD Kabupaten Kuningan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Andriani & Akbar, 2026) bahwa Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Efektivitas Manajemen. Maka dapat ditarik kesimpulannya, Biaya Operasional Fraksi Partai di DPRD Kabupaten Kuningan dapat memperhatikan kedua faktor tersebut yaitu Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas secara bersama-sama dalam upaya meningkatkan Efektivitas Manajemen.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pengaruh Transparansi Anggaran (X1) terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial terhadap Efektivitas Manajemen (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin terbuka, jelas, dan mudahnya akses informasi mengenai perencanaan serta realisasi anggaran bagi seluruh lini organisasi, maka akan semakin meningkat pula efektivitas tata kelola manajemen di tempat kerja.

Pengaruh Akuntabilitas (X2) terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial terhadap Efektivitas Manajemen (Y). Kejelasan dalam pembagian wewenang, standarisasi laporan pertanggungjawaban, serta adanya sistem reward and punishment yang tegas terbukti mampu mendorong karyawan bekerja lebih optimal demi tercapainya target efektivitas organisasi.

Pengaruh secara Simultan Transparansi Anggaran (X1) dan Akuntabilitas (X2) secara serentak (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Manajemen (Y). Temuan ini mengonfirmasi bahwa keterbukaan informasi anggaran dan kejelasan pertanggungjawaban merupakan dua pilar yang saling menguatkan. Integrasi kedua variabel ini secara bersama-sama menjadi kunci utama dalam meminimalkan hambatan kerja dan mempercepat ketercapaian tujuan manajemen.

5.2 Saran

Digitalisasi Transparansi Anggaran Manajemen disarankan untuk memanfaatkan karakteristik karyawan yang didominasi usia produktif (25-35 tahun) dengan menerapkan sistem informasi anggaran berbasis digital. Penyediaan dasbor (dashboard) internal yang menampilkan perencanaan dan realisasi dana secara berkala akan mempermudah akses informasi, meningkatkan kepercayaan karyawan, dan mempercepat efektivitas kerja. Standarisasi Pengawasan Akuntabilitas Organisasi perlu mempertegas mekanisme pertanggungjawaban di setiap lini jabatan melalui audit internal yang rutin. Manajemen juga harus menerapkan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators) yang jelas agar setiap individu memahami batasan wewenang dan tanggung jawabnya secara hukum maupun administratif. Kebijakan Terintegrasi Pimpinan instansi tidak boleh menerapkan transparansi dan akuntabilitas secara terpisah. Setiap dokumen anggaran yang dipublikasikan secara terbuka wajib disertai dengan penunjukan penanggung jawab kegiatan yang jelas, sehingga potensi penyimpangan atau pemborosan dana dapat diminimalisir secara serentak. Perluasan Variabel Penelitian Mengingat keterbatasan model yang hanya meneliti dua variabel independen, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang relevan dengan efektivitas manajemen. Faktor-faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, atau pemanfaatan teknologi informasi dapat dieksplorasi lebih dalam. Penambahan Jumlah dan Variasi Sampel Peneliti mendatang diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian dan menambah jumlah sampel responden agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan dapat diterapkan pada organisasi skala besar.

Kombinasi Metode Pengumpulan Data Untuk menghindari bias subjektivitas dari pengisian kuesioner mandiri, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode kombinasi yaitu melengkapi kuesioner dengan wawancara mendalam kepada pihak manajemen terkait agar data yang diperoleh lebih akurat dan objektif.

REFERENSI

- Aliyyah, A., Sam, R., Haliah, H., & Kusumawati, A. (2024). Disclosure of Transparency, Accountability and Value for Money Concept in Public Sector Financial Management: A Systematic Literature Review. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*. <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v3i1.245>
- Amalia, M.M. (2023). Enhancing Accountability and Transparency in the Public Sector: A Comprehensive Review of Public Sector Accounting Practices. *The ES Accounting And Finance*. <https://doi.org/10.58812/esaf.v1i03.105>
- Andriani, A., & Akbar S, M. (2026). Analysis Of Transparency and Accountability In Local Government Management And Its Implications For Public Service Performance In West Sulawesi. *Journal of Business and Management Inaba*. <https://doi.org/10.56956/93jtkn15>
- Bakhtiar, B. (2021). Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocations in Achieving Good Governance. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v4i2.824>
- Dusengimana, S., Mwirumubi, R., & Rukanyangira, N. (2026). Budgeting Practices and Financial Performance of Private Secondary Schools in Kagadi District, Western Region, Uganda. *Advanced International Journal for Research*. <https://doi.org/10.63363/aijfr.2026.v07i03.6568>
- Iskandar, D., Ujianto, H., & Riyadi, H. (2025). The Effect Of Regional Financial Accounting Systems And Accountability On Financial Performance And Public Transparency Mediated By Management Control Activities In Local Government Agencies (SKPD) In Banjarmasin City, South Kalimantan Province. *Journal of Information Systems Engineering and Management*. <https://doi.org/10.52783/jisem.v10i46s.8821>
- Kristiani, G.M., Fadillah, R., Sahrul, S., & Anggraeni, S.A. (2024). Challenges of Government Accounting Policy Reform in Indonesia. *Journal of Transformative Governance and Social Justice*. <https://doi.org/10.26905/j-tragos.v2i1.11442>
- Munandar, A., & Munir, A. (2026). The Effect of Budget Performance and Financial Management Transparency on the Financial Performance of Local Governments with Public Accountability as a Moderation Variable. *Pattimura Proceeding: Conference of Science and Technology*. <https://doi.org/10.30598/pcst.2026.iconbe.p390-415>
- Novianty, E., Putri, N., & Prabu, S. P. P. (2024). EFEKTIFITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA YANG DILAKSANAKAN OLEH KPU. *The Officium Nobile Journal*.
- Pratiwi, R.I., ah, H., & Kusumawati, A. (2024). The Influence of Transparency, Governance, and Financial Accountability in Managing Financial Reporting in the Public Sector. *International Journal of Educational and Life Sciences*. <https://doi.org/10.59890/ijels.v2i10.2571>
- Putro, W.S. (2024). The Implementation Of Supervision Regional Financial And Asset Management Perspective Justice Of Pancasila. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/DOI:10.31941/pj.v23i3.4885>
- Ramechi, N., Mulyati, & Firmansyah (2026). The Role of Transparency in Mediating the Effects of Human Capital and E-Budgeting on Village Fund Accountability in Dompu Regency. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*. <https://doi.org/10.61194/ijat.v4i1.1023>
- Safitri, K., Nirwana, & Amiruddin (2025). The Effect of Budget Participation, Functional Supervision, Decentralization, and Public Accountability on Managerial Performance with Organizational Commitment as a Moderating Variable. *International Journal For Multidisciplinary Research*.
- Sari, R., & Muslim, M. (2023). Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*. <https://doi.org/DOI:10.37531/amar.v3i2.1440>
- Shalsabila, C. A., & Kamilah, K. (2022). Analisis Penyebab Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.

- Tanjung, S.F., Tan, S., Hizazi, A., & Zamzami, Z. (2026). E-Budgeting and the Effectiveness of Pro-Poor Public Spending: An Institutional Governance Perspective from Local Government in Indonesia. *Inkubis : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. <https://doi.org/10.59261/inkubis.v8i2.260>
- Thanaraj, N., Swasthaisong, S., Romyen, L., Uypatchawong, S., Chanamarn, N., Poonhawong, S., & Uypatchawong, P. (2025). A model of transparency and effectiveness in public governance: The impact of ethical leadership, legal measures, and participatory administration. *Corporate Law & Governance Review*. <https://doi.org/10.22495/clgrv7i3sip7>
- Thi, N.P., & Linh (2025). Overview of Research on Management Efficiency. *Journal of Information Systems Engineering and Management*. <https://doi.org/10.52783/jisem.v10i48s.9484>
- Widjaja, G., & Sijabat, H.H. (2025). Public Sector Law and State Financial Management for Development Financing. *Journal of Posthumanism*. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i1.492>